

HEGEMONI PENGHULU NAGARI DALAM PROSES PENJUALAN TANAH PUSAKA TINGGI KAUM DATUK MANILIK

The Hegemony of Penghulu Nagari in the Selling Process of Pusaka Tinggi Land of Datuk Manilik Kaum

Suzanna Eddyono¹ dan Sjafrin Sairin²

*Program Studi Sosiologi
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This research explains the hegemony process of *penghulu nagari* over *kaum* society on the selling process of *pusaka tinggi* land belonged to *kaum* of Datuk Manilik, where Anai Resort & Golf Course (NGRC) has developed as a tourism area in West Sumatera. This process acquired Datuk Manilik *kaum* to sell 50 ha of their *pusaka tinggi* land. The invoke of *penghulu nagari* toward the selling process do not match the their traditional role to maintain and protect the existence of *pusaka tinggi* land or *ulayat* land of *kaum* society.

This research has identifies two levels of hegemony of the selling process. On the first level, there is the government hegemony over *penghulu nagari* through Perda No. 13/1983 and Perda No. 8/1994 whence the existence, roles, and functions of *penghulu nagari* within ingenious society were justified. Both the rules successfully places *penghulu nagari* as the translator of all the government policies in the social and cultural area to support the government and other groups programs – including the NGRC development – that invokes the Indonesia government policies. The second level is the hegemony of the *penghulu nagari* over *kaum* society through defining the consensus of all *penghulus* in that area as a cultural legitimation to justify the selling process.

These circumstances implicate a process of commodification of *pusaka tinggi* land, reducing the centrality of *penghulu kaum* supremacy, strengthening the *kaum* members individuality, and the undermining of the social relationship based on the existence of the *pusaka tinggi* land.

Keywords: *penghulu nagari* – hegemony – *pusaka tinggi* land.

[Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk](#)

PENGANTAR

Diperkenalkan sebagai proyek wisata alam, proyek pariwisata *Ngarai Resort & Golf Course* (NGRC) di Sumatera Barat, memerlukan lahan seluas 413 ha yang direncanakan dilengkapi dengan 11 jenis fasilitas, di antaranya lapangan golf 18 hole lengkap dengan *driving range* dan *club house*, 1.500 unit villa, pusat olah raga, hotel berbintang dan *cottage*, *youth hostel*, kebun raya, *camping ground*, *mountaineering track*, bentara budaya, pertokoan, dan masjid raya (Bisnis Indonesia, 10 September 1994). Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 1991, dan pada tahun 1994 telah mulai dikomersialkan. Diperkirakan dana keseluruhan berjumlah 80 milyar rupiah dengan pemegang saham 23,2% PT Bangun Cipta Sarana, 25,6% PT Barito Industri, 25,6% Burhan Uray - PT Djayanti, dan 25,6% YKP - Bank Tabungan Negara (Deparpostel 1996). Untuk merealisasikan proyek ini, pembebasan tanah milik masyarakat setempat telah dilakukan. Kaum Datuk Manilik, salah satu kaum di daerah tersebut, diminta untuk melepaskan tanah *ulayat* kaumnya seluas 50 ha.

Tanah *ulayat* kaum dan tanah pusaka tinggi bagi masyarakat Minangkabau sesungguhnya memiliki makna dan fungsi penting berkaitan dengan terbentuknya struktur masyarakat berdasarkan tradisi setempat. Secara turun-temurun, tanah pusaka tinggi tidaklah dibenarkan untuk dijual atau dialihtangankan dan harus tetap menjadi milik masyarakat kaum (M. Nasroen, 1957:177). Walaupun demikian, penggadaian tanah pusaka tinggi dapat dibenarkan dalam situasi yang sangat mendesak. Apabila harta warisan atau harta pusaka terpaksa harus digadaikan, dibutuhkan kesepakatan terutama, tindakan persetujuan penghulu kaum sebagai syarat penggadaian. Walaupun demikian, penjualan tanah pusaka tinggi Kaum Datuk Manilik berlangsung tanpa menimbulkan konflik antara kaum yang bersangkutan dengan pihak pengusaha atau pengembang kawasan NGRC. Ada dua hal yang seharusnya menimbulkan protes masyarakat terhadap pembebasan tanah *ulayat* kaum tersebut, pertama, pembebasan tanah dilakukan dengan ganti rugi yang sangat rendah; kedua, penjualan tanah *ulayat* suatu kaum, merupakan hal yang tidak dibenarkan berdasarkan tradisi masyarakat setempat (M. Nasroen, 1957:180).

Oleh karena itu, untuk dapat memahami berlangsungnya proses penjualan tanah pusaka tinggi Kaum Datuk Manilik sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diketahui: pertama, bagaimanakah struktur masyarakat berdasarkan tradisi setempat pada saat proses penjualan tanah pusaka tinggi kaum Datuk Manilik? Kedua, bagaimanakah proses penjualan tanah pusaka tinggi kaum Datuk Manilik tersebut, dan bagaimanakah peran penghulu nagari dalam proses itu. Ketiga,

bagaimanakah implikasi penjualan tersebut terhadap kaum yang menjual tanah pusaka tingginya itu dan pada aspek apakah implikasi tersebut terjadi?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan struktur masyarakat berdasarkan tradisi setempat pada saat proses penjualan tanah pusaka tinggi atau ulayat Kaum Datuk Manilik, menjelaskan proses penjualan tanah tersebut dan menjelaskan peran penghulu nagari dalam proses tersebut; serta menjelaskan implikasi pada kaum yang bersangkutan setelah proses penjualan tanah pusaka tinggi itu.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama selama Agustus 1997, dan tahap kedua pada November 1997 sampai Maret 1998. Sebuah dusun ditentukan sebagai lokasi penelitian karena dusun itu merupakan tempat dikembangkan kawasan pariwisata *Ngarai Resort & Golf Course* (NGRC), di samping itu, di dusun itu pulalah kaum Datuk Manilik tinggal.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif agar dapat menangkap sudut pandang subjektif masyarakat (Howard dan Schwartz dan Jerry Jacobs, 1979) dan agar telaah serta interpretasi yang dihasilkan juga akan dapat berangkat dari konteks sosial masyarakat itu (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994).

2. Subjek Penelitian

Oleh karena proses penjualan tanah *ulayat* kaum yang terjadi dialami oleh Kaum Datuk Manilik, maka perolehan informasi terutama digali dari kaum tersebut. Di samping itu, data diperoleh dari masyarakat dan penghulu kaum-kaum lainnya, para penghulu nagari serta aparat pemerintahan desa yang terlibat dalam proses penjualan tanah pusaka tinggi tersebut.

3. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Pengumpulan data primer terutama dilakukan melalui *participant observation* (Robert Bogdan dan Steven B. Taylor, 1992) dan wawancara mendalam. Analisis data yang dilakukan mengikuti metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga

jalur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang ketiganya dilakukan dalam suatu proses interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada masyarakat kaum di dusun Kaluo, di Sumatera Barat, penghulu nagari bertanggung jawab menyelesaikan persengketaan atau persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan tanah pusaka dan *ulayat* adat di wilayahnya. Oleh karena itu, maka penghulu nagari merupakan pihak pertama yang dihubungi oleh pemerintah daerah mengenai rencana PT Bangun Cipta Sarana untuk membeli lahan seluas 413 ha yang merupakan tanah *ulayat* di wilayah desa Kaluo dan merupakan tanah *ulayat ex onderneming* Bunga Kayu Manih. Para penghulu nagari mendukung hal ini dengan melakukan identifikasi hak atas tanah *ulayat* tersebut. Ketika itu, tanah tersebut telah sejak lama dimanfaatkan oleh para penggarap dan merupakan tempat masyarakat Kaluo – terutama masyarakat kaum Datuk Manilik – untuk mencari kayu bakar. Dalam usahanya itu, para penghulu nagari menemukan bahwa sebagian besar penggarap di tanah *ulayat* itu merupakan penggarap liar atau memiliki surat izin menggarap di luar wilayah nagari Gadang. Sesuai dengan UUPA tahun 1960, hanyalah 20 penggarap yang dinilai berhak atas seluas lima belas hektar tanah *ulayat* tersebut. Di samping itu, para penghulu nagari juga menemukan bahwa tidak terdapat satu kaum pun yang berhak atas tanah *ulayat* tersebut dan karenanya penghulu nagari menyatakan tanah *ulayat* tersebut sebagai tanah *ulayat* nagari. Akan tetapi, temuan penghulu nagari itu tidak begitu saja diterima oleh Kaum Datuk Manilik. Batas-batas tanah *ulayat* yang sebelumnya tidak dipermasalahkan masyarakat kaum kemudian menjadi sengketa yang menghadapkan dua pihak yang masing-masing menginginkan hak atas tanah *ulayat* tersebut, yaitu: para penghulu nagari dan kaum Datuk Manilik.

Untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya itu, penghulu nagari pada periode 1990 - 1997 memberikan argumentasi bahwa berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983, tanah yang ada dalam wilayah nagari yang bukan milik kaum adalah milik nagari atau merupakan harta kekayaan nagari. Oleh karena dalam penyelidikannya tidak ditemukan satu kaum pun yang berhak atas tanah *ulayat* tersebut, maka tanah tersebut dipandang sebagai harta kekayaan nagari yang disebut *tanah ulat nagari*. Dengan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah tersebut menjadi tanggung jawab para penghulu nagari. Atas tuntutan kaum Datuk Manilik tentang hal yang sama, penghulu nagari membuktikan bahwa kaum Datuk Manilik bukanlah kaum asli di Nagari Gadang untuk mendengarkan kesaksian yang diperoleh berdasarkan cerita yang

disampaikan oleh para penghulu terdahulu ataupun orang-orang yang mengetahui peristiwa terdahulu.

Dari kesaksian-kesaksian yang dikemukakan, sebagian besar membenarkan bahwa kaum Datuk Manilik merupakan kaum pendatang yang bermukim di Kaluo, yang waktu itu telah hampir punah. Para saksi menjelaskan bahwa kaum Datuk Manilik didatangkan oleh kaum Datuk Rajo Ameh agar menjaga suatu daerah yang saat itu kaum Datuk Manilik mulai menetap di nagari Gadang. Setelah seluruh kaum Datuk Rajo Ameh punah, kaum Datuk Manilik ini menggantikan kedudukannya dan mengambil alih seluruh harta pusaka yang ditinggalkan. Dengan demikian, meskipun para penghulu di nagari mengakui kedatangan kaum Datuk Manilik sebagai akibat permintaan kaum Datuk Rajo Ameh, mereka tidak menerima hal ini sebagai dasar bagi kaum Datuk Manilik yang dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat diterima untuk menolak argumentasi para penghulu nagari.

Datuk Ranjano, seorang penghulu yang mendukung klaim Kaum Datuk Manilik, menolak konsep hak ulayat nagari yang dikemukakan oleh penghulu nagari. Menurutnya, konsep tanah *ulayat* nagari sebagai harta kekayaan nagari itu hanyalah merupakan rekayasa para *penghulu nagari* untuk mendapatkan keuntungan dalam proses penjualan tanah ulayah tersebut kepada PT Bangun Cipta Sarana. Dengan menggunakan logika tradisi setempat, Datuk Ranjano mengemukakan argumentasi bahwa tanah, di mana pun letaknya, pasti ada pemiliknya. Demikian pula dengan tanah *ulayat* yang dipersengketakan itu. Kepemilikan turun-temurun secara kolektif menurut tradisi Minangkabau memungkinkan menjamin kepemilikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, apabila suatu kaum akan punah, maka kaum ini bisa memanggil *kaum pilahannya* atau kaum yang satu keturunan dengannya dari tempat lain untuk menempati dan menjaga agar harta pusaka tersebut tidak sampai diambil oleh pihak lain sebagaimana pada kaum Datuk Manilik yang dipanggil oleh kaum Datuk Rajo Ameh. Hal ini berarti bahwa secara implisit, kaum Datuk Manilik diminta untuk mengambil alih seluruh harta pusaka yang akan ditinggalkan oleh kaum Datuk Rajo Ameh. Oleh karena itulah, menurut Datuk Ranjano, kaum Datuk Manilik berhak atas tanah ulayat yang merupakan bagian dari *ex onderneming* Bunga Kayu Manih.

Pada situasi ketika para penghulu nagari mengklaim seluruh tanah *ex onderneming* Bunga Kayu Manih sebagai tanah *ulayat* nagari, kaum Datuk Manilik menemukan peta *ulayat* kaum yang menerakan nama kaum ini sebagai pemilik sebagian tanah *ulayat* tersebut. Kehadiran peta *ulayat* ini membuktikan bahwa kaum Datuk Manilik sungguh berhak

atas sebagian tanah *ulayat* yang dipersengketakan tersebut karena berdasarkan peta tersebut, luas tanah *ulayat* kaum Datuk Manilik yang masih dapat dikenali batas-batasnya adalah 50 hektar dari seluruh tanah yang dipersengketakan. Akan tetapi, kaum ini masih dihadapkan pada 20 penggarap yang telah mengusahakan 15 hektar dari tanah itu selama lebih dari dua puluh tahun.

Datuk Rajo Malik, salah seorang penghulu nagari ketika itu memberikan kesaksiannya yang mendukung para penggarap. Apabila pada pertemuan yang diselenggarakan penghulu nagari sebelumnya ia merupakan salah seorang saksi yang mengatakan bahwa kaum Datuk Manilik adalah kaum pendatang yang tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan, maka pada kesaksiannya kali ini, ia mengakui kepemilikan tanah *ulayat* kaum Datuk Manilik dengan menekankan bahwa selama para penggarap mengusahakan tanah *ulayat*nya, kaum ini tidak pernah mengajukan keberatan terhadap mereka. Kesaksiannya ini menguatkan para penggarap sehingga mereka mendapatkan haknya atas sebagian tanah *ulayat* kaum Datuk Manilik sehingga yang terakhir ini diharuskan memberi bagian dari ganti rugi yang mereka terima dari penjualan seluruh tanah *ulayat* kaum itu kepada PT Bangun Cipta Sarana.

Proses penjualan tanah *ulayat* Kaum Manilik kepada PT Bangun Cipta Sarana berlangsung tanpa protes terhadap yang terakhir sekalipun ganti rugi yang diberikan hanyalah 400 rupiah untuk setiap meter persegi. Bagi masyarakat kaum yang dipimpinnya, harga ini menjadi harga yang tak mungkin ditawarkan karena telah disetujui oleh penghulu kaumnya.

1. Hegemoni Penghulu Nagari terhadap Masyarakat Kaum

Keberhasilan penjualan tanah *ulayat* Kaum Datuk Manilik berkaitan dengan peran penghulu nagari yang merumuskan ideologi pembangunan, ideologi kepemilikan tanah bahwa di atas nagari terdapat kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan negara, dan bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam penjualan tanah pusaka tinggi. Pada proses inilah, terjadi suatu hegemoni (Joseph V. Femia, 1987), di masa pemikiran dan kesadaran masyarakat kaum digiring oleh para penghulu nagari untuk memandang persoalan penjualan tanah kaumnya sebagai hal yang wajar dan perlu demi kepentingan bersama masyarakat. Dalam hal penentuan ganti rugi, hegemoni penghulu nagari juga berhasil menciptakan penerimaan masyarakat kaum Datuk Manilik atas harga yang ditentukan telah ditentukan senilai 400 rupiah untuk setiap meter.

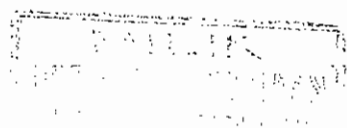
Pada proses di atas, penerimaan masyarakat kaum yang diberikan

oleh masyarakat merupakan konsensus pasif (Mansour Fakih, 1996), yang muncul bukan karena mereka kekurangan sarana konseptual sehingga konsepsi yang ada merupakan konsepsi yang berasal dari para penghulunya. Konsensus dalam hegemoni tersebut mengambil tempat dalam hubungan dengan penentuan kepemilikan, penggunaan, dan peran-peran anggota masyarakat atas tanah pusaka tinggi dalam kaum yang berkaitan erat dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan atas hubungan sosial berdasarkan kepemilikan bersama tanah pusaka tinggi.

2. Hegemoni Pemerintah terhadap Penghulu Nagari

Pembangunan yang didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pembangunan aspek-aspek lainnya mengungkapkan dua hal. Pertama, kultur atau tradisi masyarakat lokal dipandang dapat merupakan penghambat sehingga harus diubah untuk dapat akomodatif dalam merespon pembangunan ekonomi (Hotman M. Siahaan, 1991). Kedua, bahwa kultur atau tradisi masyarakat lokal tempat diselenggarakannya aktivitas pembangunan dapat merupakan pendorong bagi pembangunan ekonomi (Nat J. Colletta dalam Umar Kayam, 1987). Pada konteks yang kedua ini, unsur-unsur budaya dan tradisi ditempatkan dalam suatu kerangka struktur fungsional, sebagai struktur atau pranata yang harus dikenali, dikerahkan, dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan mengubah fungsinya secara eksperimental sehingga hanya mengubah sedikit saja struktur masyarakat berdasarkan tradisi setempat sehingga tidak merusak legitimasi pesan yang baru dan tidak merusak media tradisi itu sendiri. Peletakan tradisi untuk kepentingan pembangunan yang demikian dimungkinkan berdasarkan tiga hal berikut: pertama, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran pembangunan, kedua, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat; dan ketiga, unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi (baik yang terwujud maupun yang terpendam) yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berguna untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak pada permukaan (Imran Manan, 1992).

Apabila hal di atas ditarik untuk melihat proses penjualan tanah *ulayat* Kaum Datuk Manilik, tradisi masyarakat merupakan instrumen pembangunan karena ia merupakan alat untuk memungkinkan berlangsungnya proses yang dirumuskan pemerintah daerah sebagai pembangunan pariwisata. Hal ini dapat dijelaskan dari digunakannya peran penghulu nagari sebagai pemimpin tertinggi masyarakat kaum berdasarkan tradisi yang merupakan pusat referensi masyarakat, sekaligus



perumus berbagai kebijakan pemerintah di wilayahnya yang diformulasikan dan dirumuskan berdasarkan logika tradisi setempat (Umar Yunus, 1995). Hal ini dilakukan dengan membentuk kerangka berpikir masyarakat yang dipimpinnya. Pada kerangka inilah, tradisi difungsikan sebagai selimut ideologi untuk memberikan pembenaran bagi kepentingan orang-orang dalam suatu kelompok atau sistem sosial terhadap orang-orang lainnya dalam kelompok atau sistem sosial yang sama (Immanuel Wallerstein, 1990).

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses penjualan tanah pusaka tinggi di atas. Pertama pengusaha dengan didukung oleh pemerintah daerah, kedua, para penghulu masyarakat setempat, dan ketiga, kaum Datuk Manilik. Oleh pemerintah daerah, pengembangan kawasan wisata NGRC oleh pengusaha diperlihatkan dan dipersembahkan kepada para penghulu nagari sebagai motor penggerak bagi sebuah pembangunan nasional dan daerah. Hal ini juga dapat dipahami dengan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci (Arif Budiman, 1996). Ide atau gagasan yang dikembangkan pemerintah adalah bahwa pembebasan tanah yang dilakukan adalah untuk kepentingan pembangunan pariwisata nasional yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Menurut Antonio Gramsci (1983: 246), untuk mencapai tujuan tertentu, *political society* dapat melakukan hegemoni terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilacak dari pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari tiga lembaga terpenting, yaitu legislatif, judikatif, dan eksekutif digunakan. Ketiga lembaga ini dapat menjadi organ bagi hegemoni secara politis, dan aparat hegemonik yang paling sensitif dalam fungsinya adalah paa bidang hukum. Berdasarkan batasan ini, penerimaan penghulu nagari atas konsepsi pembangunan yang membuatnya mendukung penjualan tanah pusaka tinggi Kaum Datuk Manilik dimungkinkan melalui suatu hegemoni pemerintah yang dapat dilacak dari hubungan pemerintah dengan penghulu nagari dengan diberlakukannya peraturan-peraturan daerah yang mengakui penghulu sebagai pemimpin masyarakat berdasarkan tradisi Minangkabau. Peraturan-peraturan ini adalah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1994 tentang pedoman acara penyelesaian sengketa adat pada masyarakat (di lingkungan kerapatan adat nagari) di Sumatera Barat, ataupun Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat. Pemberlakuan peraturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsensus antara pemerintah dan penghulu masyarakat yang mengatur hubungan keduanya dalam arus kepentingan pemerintah.

Kedua perda di atas, secara langsung maupun tidak langsung, menentukan struktur-struktur kognitif dan efektif sehingga para penghulu nagari berhasil digiring untuk menilai dan memandang problematika sosial yang dihadapi masyarakatnya dalam kerangka yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam usaha mensukseskan kepentingan pengembangan kawasan wisata NGRC, dapat dilihat di samping merupakan etika politik, hegemoni pemerintah terhadap penghulu nagari juga bersifat ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ditentukan berhasil dilaksanakan (Heru Hendarto, 1993).

3. Komodifikasi Tanah Pusaka Tinggi

Berhasilnya usaha penjualan tanah pusaka tinggi Kaum Datuk Manilik dapat dinilai telah meruntuhkan tradisi yang tidak membenarkan pengalih tangan tanah pusaka tinggi kepada pihak-pihak di luar kaum yang bersangkutan. Proses penjualan ini dengan demikian menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi sebagai unsur dasar dari eksistensi suatu kaum yang mengikat seluruh anggota-anggota kaum melalui kepemilikan bersama tanah pusaka tinggi tidak lebih dari suatu komoditas ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan dapat diperjualbelikan.

Hal di atas dapat dijelaskan dengan memandang proses tersebut melalui teori komodifikasi yang dikemukakan Georg Simmel (George Ritzer, 1996). Dengan menggunakan term Simmel tersebut, proses komodifikasi tanah pusaka tinggi kaum Datuk Manilik menunjukkan terjadinya proses komodifikasi tanah pusaka tinggi tatkala tanah yang sebelumnya tidak ternilai oleh apa pun, kemudian mendapatkan nilainya sebagai komoditas ekonomi yang melepaskannya dirinya dari segenap pemaknaan kultural tradisi setempat. Tanah pusaka tinggi tidak lagi berfungsi sebagai dasar keberadaan suatu kaum; hilangnya makna kultural yang melekat padanya menghapus pula segala atribut kaum yang didasarkan atas kepemilikan bersama atas tanah pusaka tinggi tersebut. Penjualan tanah pusaka tinggi dengan demikian merupakan cara yang meletakkan tanah tersebut sebagai objek yang terpisahkan dari kaum, ia berada di luar jangkauan kaum. Secara ekonomi, dengan nilai yang, tanah menjadi sesuatu yang dikuantitaskan. Tidak saja proses penjualan tanah pusaka tinggi tersebut menciptakan reifikasi dengan tercerabutnya tanah dari kaum; ia juga meningkatkan terjadinya rasionalisasi dunia sosial sebagai kelanjutan dari proses konsensus seluruh penghulu yang diprakarsai oleh penghulu nagari untuk membenarkan tindakan penjualan tanah pusaka tinggi tersebut.

Proses komodifikasi ini juga pada akhirnya mengubah pemaknaan

masyarakat kaum Datuk Manilik mengenai fungsi dan peran penghulu nagari, dari pemelihara dan penjaga keutuhan tanah *ulayat* kaum, menjadi pihak-pihak yang mengesampingkan tradisi itu sendiri. Pada proses tersebut, tidak saja tanah sebagai faktor produksi terenggut dari kepemilikan kaum, proses itu juga telah memutuskan seluruh hubungan sosial yang terbentuk di atas kepemilikan bersama tanah pusaka tinggi sehingga eksistensi kaum tidak lagi utuh. Di samping itu, penghulu kaum tidak lagi memiliki dasar bagi supremasinya atas masyarakat yang dipimpinnya karena pengambilan keputusan dan sanksi-sanksi penghulu terhadap anggota kaum tidak lagi berlangsung efektif karena sanksi tidak lagi memiliki kekuatan memaksa tanpa keberadaan tanah pusaka tinggi.

Pada hubungan antar kaum, proses komodifikasi ini juga memutuskan hubungan sejarah kaum Datuk Manilik dengan kaum-kaum lainnya. Penjualan tanah *ulayat* kaum Datuk Manilik, membuat kaum ini tidak lagi berhubungan timbal-balik dengan kaum-kaum lainnya dalam hal membuktikan kepemilikan atas tanah *ulayat*. Sejarah tanah pusaka tinggi atau tanah *ulayat* Kaum Datuk Manilik telah terputus, pengalihan tanah pusaka tingginya kepada pihak NGRC telah memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan tertulis yang menjadi bukti kepemilikan tanah *ulayat* kaum-kaum yang berbatasan dengan tanah tersebut sehingga peran kaum ini dalam memberikan kesaksian batas-batas kepemilikan tanah *ulayat* kaum lainnya pun telah tergantikan. Pada akhirnya, komodifikasi tanah pusaka tinggi menyebabkan kesaksian-kesaksian secara lisan yang dapat dinilai dengan uang, sehingga semakin mahal harga kesaksian tersebut, semakin kuat pula posisi pihak yang diuntungkan oleh para saksi dalam suatu persengketaan tanah pusaka tinggi.

KESIMPULAN

Pada proses penjualan tanah pusaka tinggi atau *ulayat* kaum Datuk Manilik, peran penghulu nagari merupakan elit masyarakat yang memegang peranan penting bagi dalam struktur masyarakat berdasarkan tradisi maupun dalam membentuk kerangka berpikir masyarakat dan merupakan perumus sistem nilai yang ideal bagi masyarakat kaum. Dalam hegemoninya pada masyarakat kaum tersebut, terdapat dua rumusan yang berikannya, pertama dengan bahwa masyarakat adat bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah, dan kedua, bahwa berdasarkan persetujuan seluruh penghulu di nagari dapat membenarkan proses penjualan tanah pusaka tinggi.

Hal di atas terlepas dari hegemoni pemerintah terhadap penghulu nagari yang bersumber dari perumusan peran dan fungsi penghulu

nagari dalam Perda No. 13 Tahun 1983 dan Perda No 8 Tahun 1994. Hegemoni pemerintah ini berhasil dengan penyebaran ideologi pembangunan pariwisata, kepentingan umum, penguasaan tanah oleh negara, dan ideologi keberadaan negara sebagai penguasa tertinggi di atas nagari.

Keterkaitan yang sangat erat antara kaum, tanah, dan penghulu dalam masyarakat kaum menyebabkan terjadinya perubahan pada hubungan sosial yang ada pada sistem masyarakat tersebut dengan berkurang atau hilangnya salah satu dari ketiga unsur tersebut. Implikasi penjualan tanah pusaka tinggi kaum Suku Pisang Datuk Manilik tidak hanya dalam bentuk melemahnya supremasi penghulu kaum terhadap masyarakat kaum yang dipimpinnya dan munculnya komodifikasi tanah pusaka tinggi, tetapi juga munculnya perubahan persepsi masyarakat kaum terhadap peranan para penghulu nagari dalam masyarakat itu. Para penghulu nagari ini tidak lagi dimaknai sebagai pimpinan masyarakat yang dapat menjamin keutuhan tanah pusaka tinggi masyarakat kaum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert; Taylor, Steven J., 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Budiman, Arief, "Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional Kita dan Dunia Mencoba Mencari Sistem Alternatif Terhadap Kapitalisme", dalam *Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia)*, 1992/1993, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta.
- Colleta, Nat J., 1987, *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, disunting oleh Nat J. Colletta dan Umar Kayam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Denzin, Norman K; Lincoln Yvonna S., 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Femia, Joseph V., 1987, *Gramsci's Political Thought Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*, Clarendon Press, Oxford.
- Gramsci, Antonio, 1983, diedit oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, *Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, International Publisher, New York.
- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", disunting oleh Tim Redaksi Driyakarya, 1993, *Diskursus Kemasyarakatan dan kemanusiaan*, Gramedia, Jakarta.

- Manan, Imran, 1995, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, Padang.
- Miles, Matthew B.; Huberman, A Michael; 1984, *Qualitative Data Analysis: A Source of New Methods*, Sage Publication, London.
- Nasroen, M., 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, CV Penerbit Pasaman, Jakarta.
- Ritzer, George, 1996, *Classical Sociological Theory*, Mc Graw-Hill Companies, Inc., New York.
- Siahaan, Hotman M., "Potensi Kebudayaan dan Masalah Pembangunan", dalam *Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Nasional, Kini dan di Masa Depan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1992/1993.
- Wallerstein, Immanuel, "Culture as Ideological Battleground of the Modern World System", dalam Mike Featherstone (editor), 1990, *Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity*, Sage Publication, London.